

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 270 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menbatja : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 12 Oktober 1952 No.63831 tentang penundaan konperensi ECAFE First Session Railway Sub-Committee yang semula akan diadakan di Bangkok;

Menimbang : a. bahwa konperensi ECAFE tersebut tidak jadi diadakan di Bangkok sebagaimana ditetapkan semula, tetapi akan diadakan di Bandung dari tanggal 14 s/d 17 Djanuari 1953;

b. bahwa, berhubung dengan perubahan tersebut perutusan Republik Indonesia ke konperensi First Session Railway Sub-Committee di Bangkok, sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan kami tanggal 22 Agustus 1952 No.194 tahun 1952, perlu dibatalkan;

Mengingat : Keputusan kami tanggal 22 Agustus 1952 No.194 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

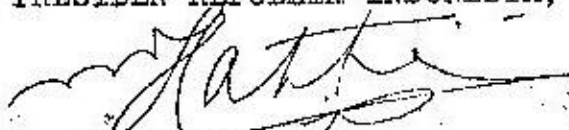
Membatalkan surat Keputusan kami tanggal 22 Agustus 1952 No.194 tahun 1952 mengenai perutusan Republik Indonesia dalam konperensi "Railway Sub-Committee" dari Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) yang semula akan diadakan di Bangkok Thailand dari tanggal 20 - 25 Oktober 1952 (First Session) dengan ketetapan lebih lanjut, bahwa perutusan Republik Indonesia di Konperensi ECAFE yang akan diadakan di Bandung akan ditetapkan kemudian.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Keuangan + Paspor),
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Perhubungan,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kepala Djawatan Kereta Api,
8. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Duta Republik Indonesia di Bangkok,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
12. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
13. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan de Javasche Bank,
14. Yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Nopember 1952.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,



DJUANDA.